

## ABSTRAK

**Madi Syarifuddin** (0062.02.41.2014), *Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945* (dibimbing oleh **Andi Muin Fahmal** selaku pembimbing I dan **Ahmad Fadil** selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) perencanaan pembangunan nasional sebelum amandemen UUD 1945, dan (2) apa kelebihan dan kekurangan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam sistem pemerintahan presidensial pasca amandemen UUD 1945.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji berbagai literatur-literatur dan ketentuan perundang-undangan, dengan pendekatan sejarah, komparatif dan evaluatif yang menitikberatkan pada sumber data sekunder. Karenanya tehnik pengumpulan datanya menggunakan tehnik studi kepustakaan dengan tehnik analisis secara deskripsi, evaluasi dan argumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan sebelum amandemen UUD 1945 sejalan dengan perubahan atau pergantian konstitusi yaitu; Era 1945-1949 (UUD 1945), Era 1950-1959 (UUD RIS- UUDS 1950), Era 1960-1965 (kembali ke UUD 1945 dengan Sistem Terpimpin) dan Era 1966-1998 (kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen) dan perencanaan pembangunan nasional sebelum amandemen UUD 1945 juga sudah dimulai berbasis ilmu pengetahuan yaitu saat perencanaan pembangunan model GBHN pada zaman Orde Baru. Kemudian kelebihan perencanaan pembangunan pasca amandemen UUD 1945 model SPPN-RPJPN-RPJMN adalah secara normatif sudah ideal, secara substansial lebih demokratis-aspiratif dan partisipatif, kemudian sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial serta sejalan dengan penguatan otonomi daerah. Sedangkan kekurangannya adalah *president centris* dan politis, legitimasinya tidak sekuat GBHN, masih belum lengkapnya aturan yang mengatur serta adanya permasalahan dalam konsistensi dan implementasi.

Rekomendasinya adalah perlunya penguatan implementasi UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait perencanaan, kewenangan dan integrasi dengan perencanaan spasial, karena itu perlu penguatan peran Gubernur untuk mensinergikan implementasi dan menjaga konsistensi sistem perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Kemudian perlu penelitian lebih lanjut bagaimana model GBHN dalam *setting* sistem pemerintahan presidensial.

Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Pemerintahan Presidensial, Amandemen UUD 1945, SPPN, RPJPN, RPJMN, GBHN.

## ABSTRACT

**Madi Syarifuddin** (0062.02.41.2014), *The National Development Plan in The Presidential Government System Aftar The Amandment 145 Constitution (Supervised by **Andi Muin Fahmal** as a Supervisor I and **Ahmad Fadil** as a Supervisor II).*

*This research aims to investigate (1) the national development plan before the amendment of 1945 constitution, and (2) the superioritas and the shortcomings of the national development plan in the government system afther the amendment of 1945 contitution.*

*The research is a normative legal research which studies various literatures and the regulations of the laws using the historical, comparative, and evaluative approaches with the emphasis on the sources of secondary data. Therefore, the technique is descriptive, evaluative and argumentative.*

*The research results indicates that the development before the amendment of 1945 constitution was in line with the change or the replacement of the constitution, namely the 1945-1949 Era, (1945 constitution), 1950-1959 Era (RIS constitution – 1950 UUDS Constitution), 1960-1965 Era (Back to 1945 Constitution with the Leded System), and 1966-1998 Era (Back to 1945 Constitution with purity and consequence). And the national development plan before the amendment of 1945 constitution which was based on the scientific knowledge, i.e. the development plan model GBHN in the New Era. Then, it follows the superiority of the development plan after the amendment of 1945 Constitution, SPPN-RPJPN-RPJMN model which is normative and ideal. Substantially it is more democratic, aspirant, and participative, more agreeing with the presidential government and in line with the empowerment of the autonomy of the regions. Menwhile, the shortcomings of the system are the fact that it is presidential and political centre, its legitimate is not as strong as GBHN, and the incomplete regulations which can implement the regulation as well as the problems related to the consistence and implementation.*

*Thus, the research recommendation is to empower the implementation of UU No.25 of 2004 about the National Development Planning System with the synchronization of the legal regulations related to the plan, budgeting, plan authority in the local governments and the integration of the spatial plan. Therefore, it is necessary to strengthen the roles of the governors to creaty synergy in the implementation and safeguard the consistent system of the central and local development plans. Last but not least, it is necessary that further researches should be conducted to study how the GBHN model is setting the presidential government system.*

**Keywords** : National Development Plan, Presidential Government System, Amandment of 1945 Constitution, SPPN, RPJPN, RPJMN, GBHN.